

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam bidang ekonomi yang dialami Indonesia adalah merupakan salah satu contoh konkrit perkembangan perekonomian di dunia. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya harus di tunjang dengan perusahaan perbankan yang memadai karena perbankan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Dalam dunia perbankan bahwa perkembangan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia.

Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu.

Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di samping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta

keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan pada bank. Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karenanya Bank Indonesia menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Ponttie Prasnanugraha (2007) menyatakan bahwa “aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana”. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, yang dikenal dengan *CAMEL*. Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *corporate governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara.

Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh

dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. Lemahnya penerapan *corporate governance* menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan. Terjadinya berbagai kasus perbankan yang banyak terjadi di Indonesia membuat banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan. Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat.

Corporate governance lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *corporate governance* di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan dan bagaimana korelasi antar kebijakan tentang buruh dan kinerja perusahaan.

Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan,

mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan lebih efisien dan daya saingnya meningkat. Riset *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang dikutip oleh Joni Emirzon (2007: 208) menemukan bahwa “alasan utama perusahaan menerapkan *good corporate governance* (GCG) adalah kepatuhan terhadap peraturan”.

Perusahaan meyakini bahwa implementasi *good corporate governance* (GCG) merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi *good corporate governance* berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan *good corporate governance*, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan. GCG mengandung lima prinsip utama, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*). Prinsip tersebut diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di

tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

Manajer dengan informasi yang dimilikinya dapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik. Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut. Maka untuk mengatasi permasalahan *agency*, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai *good corporate governance* dibutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil.

Menurut Zaenal Arifin (2005) “mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan tersebut”. Pengawasan merupakan bagian integral dari proses manajemen. Mengawasi berarti melihat dan memperhatikan apakah yang dilaksanakan (kenyataan) sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan (rencana). Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *eksternal mechanism*. *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan

direksi, komposisi dewan komisaris, komite audit dan pertemuan dengan *board of director*.

Menurut Iskandar dan Chamlaio yang dikutip Hexana Sri Lastanti (2004) “*External mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dengan mekanisme pasar”. Dalam hal ini kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan). “Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer” (Utami dan Rahmawati, 2009). Kepemilikan institusional juga menjadi faktor penting bagi mekanisme GCG. Insitusi merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan.

Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan (lastanti, 2005). Dengan adanya kepemilikan institusional maka proses monitoring akan berjalan lebih efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam hal manajemen laba yang dapat merugikan kepentingan pihak lain (*stakeholder*). Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau

bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Tujuan utama adanya Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris pada dasarnya adalah sebagai penyeimbang pengawasan dan penyeimbang persetujuan atau keputusan yang diperlukan. Menurut FCGI (2002) menyatakan bahwa “komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen”. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Maka dalam penelitian ini akan dianalisis mekanisme untuk mengendalikan perusahaan dengan struktur dan proses internal, yaitu: Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan keberadaan Komite Audit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh Komite audit terhadap kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan informasi khususnya yang berkaitan tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* serta untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan *good corporate governance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepentingan Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja suatu bank.

- b. Bagi Perusahaan Perbankan

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk menilai tingkat kesehatan perbankan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan.

- c. Bagi Penulis

Sebagai kajian dan bahan referensi untuk menambah wawasan dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari Metode penelitian ini adalah jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan variabel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dalam

penelitian, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN